

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**Bab I
Pendahuluan**

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Permenataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab II
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN BELANJA	Rp 12.297.162.149,00	Rp 11.712.541.098,00	95,25
Surplus (defisit)	Rp (12.297.162.149,00)	Rp (11.712.541.098,00)	95,25

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN BELANJA	Rp 12.491.296.285,00	Rp 11.712.541.098,00	93,77
Surplus (defisit)	Rp (12.491.296.285,00)	Rp (11.712.541.098,00)	93,77

Realisasi Pendapatan SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari target sebesar Rp 0 naik 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.712.541.098,00 atau 95,25 % dari target sebesar Rp 12.297.162.149,00 dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.491.296.285,00.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0%. Retribusi Daerah sebesar 0%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah	-	-	-	-
	Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	Pendapatan Daerah	-	-	-	-

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pajak Daerah	-	-	-
	Retribusi Daerah	-	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
	Pendapatan Daerah	-	-	-

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94,22%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.035.769.598,00 turun sebesar 2,40 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.300.164.235,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 5,78%. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 685.565.522,00 atau sebesar 98,72% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 685.565.522,00 dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.191.132.050,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	Rp 11.611.596.627,00	Rp 11.035.769.598,00	95,04	94,2%
	Belanja Pegawai	Rp 5.118.738.000,00	Rp 4.701.272.473,00	91,84	40,1%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.492.858.627,00	Rp 6.334.497.125,00	97,56	54,1%
	Belanja Hibah	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
2	Belanja Modal	Rp 685.565.522,00	Rp 676.771.500,00	98,72	5,8%
	Belanja Tanah	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 685.565.522,00	Rp 676.771.500,00	98,72	5,8%
	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	0,00	0,0%
	Jumlah Belanja	Rp 12.297.162.149	Rp 11.712.541.098		100%

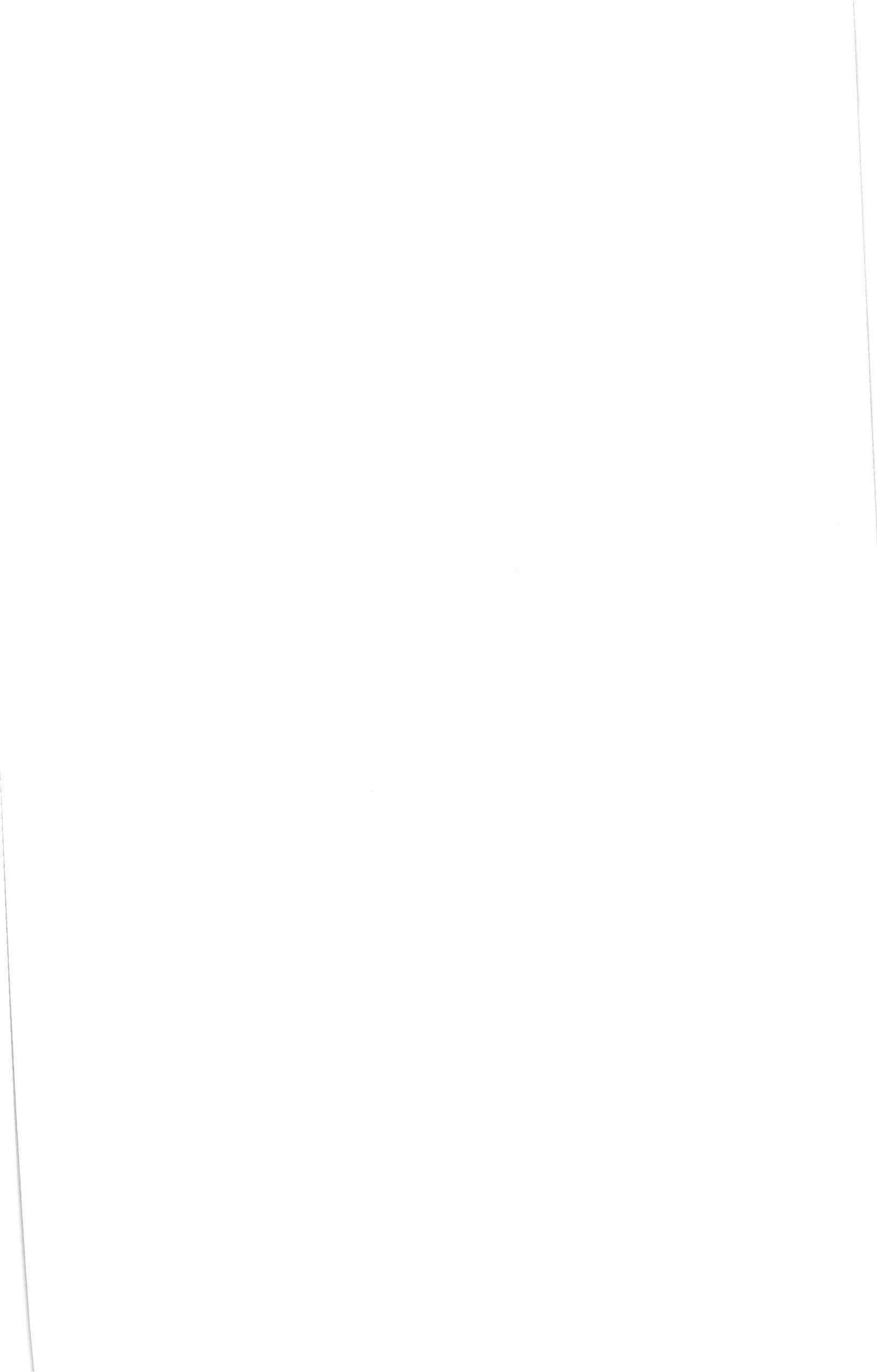
Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi	Rp 11.300.164.235,00	Rp 11.035.769.598,00	97,66
	Belanja Pegawai	Rp 4.576.300.775,00	Rp 4.701.272.473,00	102,73
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.723.863.460,00	Rp 6.334.497.125,00	94,21
	Belanja Hibah	Rp -	Rp -	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	0,00
2	Belanja Modal	Rp 1.191.132.050,00	Rp 676.771.500,00	56,82
	Belanja Tanah	Rp -	Rp -	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 1.191.132.050,00	Rp 676.771.500,00	56,82
	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp -	Rp -	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
	Jumlah Belanja	Rp 12.491.296.285	Rp 11.712.541.098	

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi	(%)	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
1	BELANJA	Rp 12.297.162.149,00	Rp 11.712.541.098,00	93,98	74,78%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 9.319.453.399,00	Rp 8.758.459.648,00	93,98	0,03%
3	Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp 3.265.308,00	Rp 3.265.308,00	100,00	0,01%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 715.308,00	Rp 715.308,00	100,00	0,02%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	100,00	0,02%
6	Koordinasi dan Penvusunan Dokumen RKA-	Rp 3.940.000,00	Rp 3.940.000,00	100,00	0,03%

7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	540.000,00	Rp	540.000,00	100,00	0,00%
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.400.000,00	Rp	3.400.000,00	100,00	0,03%
9	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Rp	3.425.000,00	Rp	3.425.000,00	100,00	0,03%
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	600.000,00	Rp	600.000,00	100,00	0,01%
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.825.000,00	100,00	0,02%
12	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	35.419.000,00	Rp	35.419.000,00	100,00	0,30%
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	660.000,00	Rp	660.000,00	100,00	0,01%
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.275.000,00	Rp	2.275.000	100,00	0,02%
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	32.484.000,00	Rp	32.484.000,00	100,00	0,28%
16	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Rp	3.425.000,00	Rp	3.425.000	100,00	0,03%
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	600.000,00	Rp	600.000	100,00	0,01%
18	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.825.000	100,00	0,02%
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	2.595.308,00	Rp	2.595.308,00	100,00	0,02%
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	895.308,00	Rp	895.308,00	100,00	0,01%
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.700.000,00	Rp	1.700.000,00	100,00	0,01%
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3.062.500,00	Rp	3.062.500,00	100,00	0,03%
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	787.500,00	Rp	787.500,00	100,00	0,01%
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.275.000,00	Rp	2.275.000	100,00	0,02%
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.118.738.000,00	Rp	4.701.272.473,00	91,84	40,14%
26	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	1.632.618.155,00	Rp	1.606.641.834,00	98,41	13,72%
27	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp	111.645.460,00	Rp	76.886.386,00	68,87	0,66%
28	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp	134.551.683,00	Rp	130.459.836,00	96,96	1,11%
29	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp	15.630.364,00	Rp	10.764.096,00	68,87	0,09%
30	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp	139.679.750,00	Rp	103.390.000,00	74,02	0,88%
31	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp	33.624.000,00	Rp	18.000.000,00	53,53	0,15%
32	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp	62.674.250,00	Rp	58.300.000,00	93,02	0,50%
33	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp	6.447.250,00	Rp	4.440.000,00	68,87	0,04%
34	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp	87.443.529,00	Rp	82.413.960,00	94,25	0,70%
35	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp	10.095.348,00	Rp	6.952.320,00	68,87	0,06%
36	Belanja Tunjangan PPn/Tunjangan Khusus PNS	Rp	41.967.451,00	Rp	34.024.195,00	81,07	0,29%
37	Belanja Tunjangan PPn/Tunjangan Khusus PPPK	Rp	747.125,00	Rp	373.812,00	50,03	0,00%
38	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	100.013,00	Rp	23.866,00	23,86	0,00%
39	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp	5.737,00	Rp	1.747,00	30,45	0,00%
40	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	167.948.187,00	Rp	132.688.828,00	79,01	1,13%
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	8.149.653,00	Rp	4.574.724,00	56,13	0,04%
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	3.936.185,00	Rp	3.307.278,00	84,02	0,03%
43	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	290.019,00	Rp	161.469,00	55,68	0,00%
44	Belanja Iuran Jaminan Kematiann PNS	Rp	11.808.797,00	Rp	9.921.995,00	84,02	0,08%
45	Belanja Iuran Jaminan Kematiann PPPK	Rp	870.044,00	Rp	484.386,00	55,67	0,00%
46	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Rp	-	Rp	-	0,00	0,00%
47	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Rp	-	Rp	-	0,00	0,00%
48	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp	1.225.125.000,00	Rp	1.138.955.203,00	92,97	9,72%
49	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	Rp	16.673.000,00	Rp	12.940.180,00	77,61	0,11%
50	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	Rp	117.741.000,00	Rp	73.674.786,00	62,57	0,63%
51	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	1.252.297.000,00	Rp	1.169.288.848,00	93,37	9,98%
52	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	29.109.000,00	Rp	22.602.724,00	77,65	0,19%
53	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Rp	3.670.000,00	Rp	3.670.000,00	1359,26	0,03%
54	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	270.000,00	Rp	270.000,00	7,94	0,00%
55	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.400.000,00	Rp	3.400.000,00	91,89	0,03%
56	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	3.700.000,00	Rp	3.700.000,00	1233,33	0,03%
57	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00	8,82	0,00%
58	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.400.000,00	Rp	3.400.000,00	100,00	0,03%
59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	2.570.000,00	Rp	2.570.000,00	100,00	0,02%
60	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	270.000,00	Rp	270.000,00	100,00	0,00%
61	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.300.000,00	Rp	2.300.000,00	100,00	0,02%
62	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp	1.504.900,00	Rp	1.504.900,00	100,00	0,01%
63	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	354.900,00	Rp	354.900,00	100,00	0,00%
64	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.150.000,00	Rp	1.150.000	100,00	0,01%
65	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	5.770.200,00	Rp	2.609.800,00	45,23	0,02%
66	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	670.200,00	Rp	670.200,00	100,00	0,01%
67	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.100.000,00	Rp	5.100.000,00	100,00	0,04%
68	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis	Rp	3.719.800,00	Rp	3.719.800,00	100,00	0,03%
69	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	319.800,00	Rp	319.800,00	100,00	0,00%
70	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.400.000,00	Rp	3.400.000,00	100,00	0,03%
71	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Rp	3.583.300,00	Rp	3.517.000,00	98,15	0,03%
72	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	183.300,00	Rp	183.300,00	100,00	0,00%
73	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.400.000,00	Rp	3.334.000,00	98,06	0,03%
74	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	4.494.500,00	Rp	4.439.300,00	98,77	0,04%
75	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	244.500,00	Rp	244.300,00	99,92	0,00%
76	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	4.250.000,00	Rp	4.195.000,00	98,71	0,04%
77	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Rp	2.886.800,00	Rp	2.737.800,00	94,84	0,02%
78	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	61.800,00	Rp	49.800	80,58	0,00%
79	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.688.000,00	95,15	0,02%
80	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Rp	3.069.500,00	Rp	2.814.500,00	91,69	0,02%
81	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	244.500,00	Rp	244.500,00	100,00	0,00%
82	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.570.000,00	90,97	0,02%
83	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	2.865.500,00	Rp	2.789.000,00	97,33	0,02%
84	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	40.500,00	Rp	-	0,00	0,00%
85	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.789.000,00	98,73	0,02%
86	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	2.876.000,00	Rp	2.811.000,00	97,74	0,02%
87	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	51.000,00	Rp	51.000,00	100,00	0,00%
88	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.825.000,00	Rp	2.760.000	97,70	0,02%
89	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Rp	16.004.100,00	Rp	15.954.800,00	99,69	0,14%
90	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	734.100,00	Rp	733.800,00	99,96	0,01%
91	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	15.270.000,00	Rp	15.221.000,00	99,68	0,13%
92	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp	53.792.000,00	Rp	53.792.000,00	100,00	0,46%
93	Komputer	Rp	4.300.000,00	Rp	4.300.000,00	100,00	0,04%
94	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp	49.042.000,00	Rp	49.042.000,00	100,00	0,42%
95	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	450.000,00	Rp	450.000	100,00	0,00%
96	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	458.650.165,00	Rp	458.650.165	100,00	3,92%
97	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp	7.000.000,00	Rp	7.000.000	100,00	0,06%
98	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp	31.762.730,00	Rp	25.708.345	80,94	0,22%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan	Rp	63.792.980,00	Rp	63.748.320	99,93	0,54%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan	Rp	42.552.000,00	Rp	42.552.000	100,00	0,36%



99	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 229.502.500,00	Rp 229.502.500	100,00	1,96%
100	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	Rp 4.096.000,00	Rp 4.000.000	97,66	0,03%
101	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp 3.496.000,00	Rp 3.326.000	95,14	0,03%
102	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp 2.975.000,00	Rp 2.975.000	100,00	0,03%
103	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000	100,00	0,60%
104	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Ba	Rp 1.156.900,00	Rp 1.150.000	99,40	0,01%
105	Belanja Modal Alat Ukar Universal	Rp 420.000,00	Rp 420.000	100,00	0,00%
106	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp 1.920.000,00	Rp 950.000	49,48	0,01%
107	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp 5.423.000,00	Rp 5.423.000	100,00	0,05%
108	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainn	Rp 1.897.500,00	Rp 1.895.000	99,87	0,02%
109	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150.497.870,00	Rp 150.436.900	99,96	1,28%
110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	Rp 75.443.400,00	Rp 75.408.400	99,95	0,64%
111	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000	100,00	0,04%
112	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	Rp 38.428.500,00	Rp 38.428.500	100,00	0,33%
113	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp 31.825.970,00	Rp 31.800.000	99,92	0,27%
114	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 104.056.500,00	Rp 102.757.900	98,75	0,88%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan	400.000,00		0,00	0,00%
115	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Ceta	Rp 103.656.500,00	Rp 102.757.900	99,13	0,88%
116	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp 3.240.106,00	Rp 2.760.000	85,18	0,02%
117	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 3.240.106,00	Rp 2.760.000	85,18	0,02%
118	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp 203.304.000,00	Rp 199.329.485	98,05	1,70%
119	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 18.460.000,00	Rp 18.301.000	99,14	0,16%
120	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 13.244.000,00	Rp 13.244.000	100,00	0,11%
121	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 171.600.000,00	Rp 167.784.485	97,78	1,43%
122	Pengadaan Mebel	Rp 80.593.000,00	Rp 80.530.000	99,92	0,69%
123	Belanja Modal Alat Pimpinan Perlengkapan Kantor	Rp 19.800.000,00	Rp 19.800.000	100,00	0,17%
124	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000	100,00	0,07%
125	Belanja Modal Mebel	Rp 52.793.000,00	Rp 52.730.000	99,88	0,45%
126	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 523.450.652,00	Rp 515.725.000	98,52	4,40%
127	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 134.624.000,00	Rp 136.100.000	101,10	1,16%
128	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	Rp 12.971.652,00	Rp 12.275.000	94,63	0,10%
129	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp 81.060.000,00	Rp 79.925.000	98,60	0,68%
130	Belanja Modal Humidity Control	Rp 3.450.000,00	Rp 3.425.000	99,28	0,03%
131	Belanja Modal Personal Computer	Rp 183.745.000,00	Rp 181.750.000	98,91	1,55%
132	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 3.000.000,00	Rp 2.700.000	90,00	0,02%
133	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp 102.800.000,00	Rp 99.550.000	96,84	0,85%
134	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.215.800,00	Rp 4.215.800	100,00	0,04%
135	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000	100,00	0,03%
136	Belanja Paket/Pengiriman	Rp 3.000.000,00	Rp 215.800	7,19	0,00%
137	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Rp 16.500.000,00	Rp 7.950.000	48,18	0,07%
138	Belanja Tagihan Telepon	Rp 16.500.000,00	Rp 14.732.900	89,29	0,13%
139	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.228.583.086,00	Rp 1.220.567.009	99,35	10,42%
140	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	Rp 6.900.000,00	Rp 6.900.000	100,00	0,06%
141	Belanja Jasa Tenaga Pelanggan Umum	Rp 601.719.638,00	Rp 595.726.319	99,00	5,09%
142	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 486.163.448,00	Rp 486.138.090	99,99	4,15%
143	Belanja Jasa Pencucian Pakaian Alat Kesenian dan	Rp 34.800.000,00	Rp 34.500.000	99,14	0,29%
144	Belanja Sewa Tanaman	Rp 99.000.000,00	Rp 97.302.600	98,29	0,83%
145	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	Rp 217.985.000,00	Rp 208.457.500	95,63	1,78%
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				
146	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 144.310.000,00	Rp 144.279.400	99,98	1,23%
147	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Rp 14.875.000,00	Rp 6.144.600	41,31	0,05%
148	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	Rp 49.500.000,00	Rp 48.961.500	98,91	0,42%
149	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 9.300.000,00	Rp 9.072.000	97,55	0,08%
150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	Rp 7.500.000,00	Rp 5.360.000	71,47	0,05%
151	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Rp 2.100.000,00	Rp -	0,00	0,00%
152	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 5.400.000,00	Rp 5.360.000	99,26	0,05%
153	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 197.145.200,00	Rp 195.898.000	99,37	1,67%
154	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 48.015.200,00	Rp 47.498.000	98,92	0,41%
155	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000	100,00	0,13%
156	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric	Rp 30.000.000,00	Rp 29.700.000	99,00	0,25%
157	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000	100,00	0,01%
158	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 9.650.000,00	Rp 9.650.000	100,00	0,08%
159	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 35.380.000,00	Rp 35.200.000	99,49	0,30%
160	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000	100,00	0,08%
161	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	Rp 10.500.000,00	Rp 10.250.000	97,62	0,09%
162	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	Rp 16.200.000,00	Rp 16.200.000	100,00	0,14%
163	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	Rp 22.000.000,00	Rp 22.000.000	100,00	0,19%
164	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Rp 829.226.409,00	Rp 732.844.100	88,38	6,26%
165	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	Rp 60.000.000,00	Rp 59.009.100	98,35	0,50%
166	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 769.226.409,00	Rp 673.835.000	87,60	5,75%
167	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Rp 1.331.425.250,00	Rp 1.314.472.750	98,73	11,22%
168	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Rp 540.461.250,00	Rp 526.868.750	97,49	4,50%
169	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	Rp 2.324.250,00	Rp 2.324.000	99,99	0,02%
170	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	Rp 10.200.000,00	Rp 10.200.000	100,00	0,09%
171	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 219.760.000,00	Rp 219.706.000	99,98	1,88%
172	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp 36.000.000,00	Rp 25.700.000	71,39	0,22%
173	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 80.577.000,00	Rp 80.577.000	100,00	
174	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 21.600.000,00	Rp 19.300.000	89,35	0,16%
175	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp 150.000.000,00	Rp 149.211.750	99,47	1,27%
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp 20.000.000,00	Rp 19.850.000	99,25	0,17%

176	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp	790.964.000,00	Rp	787.604.000	99,58	6,72%
177	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	19.902.000,00	Rp	19.902.000	100,00	0,17%
178	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	20.000.000,00	Rp	19.224.000	96,12	0,16%
179	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	Rp	4.800.000,00	Rp	4.800.000	100,00	0,04%
180	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	76.750.000,00	Rp	76.666.000	99,89	0,65%
181	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000	100,00	0,02%
182	Honorarium Narasumber atau Pembahasan Moderator Pengembangan Perizinan Berusaha	Rp	12.000.000,00	Rp	9.500.000	79,17	0,08%
183	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	114.612.000,00	Rp	114.612.000	100,00	0,98%
184	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp	900.000,00	Rp	900.000	100,00	0,01%
185	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	Rp	240.000.000,00	Rp	240.000.000	100,00	2,05%
186	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000	100,00	1,28%
187	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000	100,00	1,28%
188	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	Rp	698.550.000,00	Rp	698.550.000	100,00	5,96%
189	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp	507.626.000,00	Rp	507.626.000	100,00	4,33%
190	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	480.000,00	Rp	480.000	100,00	0,00%
191	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	17.000.000,00	Rp	17.000.000	100,00	0,15%
192	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	490.146.000,00	Rp	490.146.000	100,00	
193	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp	117.812.000,00	Rp	117.812.000	100,00	1,01%
194	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	1.580.000,00	Rp	1.580.000	100,00	0,01%
195	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	14.800.000,00	Rp	14.800.000	100,00	0,13%
196	Honorarium Narasumber atau Pembahasan Moderator Pengembangan Perizinan Berusaha	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000	100,00	0,02%
197	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	99.432.000,00	Rp	99.432.000	100,00	0,85%
198	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp	73.112.000,00	Rp	73.112.000	100,00	0,62%
199	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	10.538.000,00	Rp	10.538.000	100,00	0,09%
200	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	14.250.000,00	Rp	14.250.000	100,00	0,12%
201	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	48.324.000,00	Rp	48.324.000	100,00	0,41%
202	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Rp	629.968.800,00	Rp	625.192.000	99,24	5,34%
203	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	Rp	60.072.000,00	Rp	59.657.600	99,31	0,51%
204	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	3.300.000,00	Rp	3.285.600	99,56	0,03%
205	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000	100,00	0,01%
206	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	Rp	1.600.000,00	Rp	1.600.000	100,00	0,01%
207	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	36.100.000,00	Rp	36.100.000	100,00	0,31%
208	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	6.072.000,00	Rp	6.072.000	100,00	0,05%
209	Honorarium Narasumber atau Pembahasan Moderator Pengembangan Perizinan Berusaha	Rp	12.000.000,00	Rp	11.600.000	96,67	0,10%
210	Bimbingan Teknik kepada Pelaku Usaha	Rp	353.255.000,00	Rp	351.055.000	99,38	3,00%
211	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	9.187.000,00	Rp	9.187.000	100,00	0,08%
212	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	Rp	14.000.000,00	Rp	14.000.000	100,00	0,12%
213	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	169.400.000,00	Rp	169.400.000	100,00	1,45%
214	Honorarium Narasumber atau Pembahasan Moderator Pengembangan Perizinan Berusaha	Rp	79.200.000,00	Rp	77.000.000	97,22	0,66%
215	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	81.468.000,00	Rp	81.468.000	100,00	0,70%
216	Pengawasan Penanaman Modal	Rp	216.641.800,00	Rp	214.479.400	99,00	1,83%
217	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	8.250.000,00	Rp	8.187.600	99,24	0,07%
218	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	Rp	3.319.800,00	Rp	3.319.800	100,00	0,03%
219	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	Rp	2.400.000,00	Rp	2.400.000	100,00	0,02%
220	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	33.700.000,00	Rp	33.700.000	100,00	0,29%
221	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	15.180.000,00	Rp	15.180.000	100,00	0,13%
222	Honorarium Narasumber atau Pembahasan Moderator Pengembangan Perizinan Berusaha	Rp	12.000.000,00	Rp	9.900.000	82,50	0,08%
223	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000	100,00	0,10%
224	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	129.792.000,00	Rp	129.792.000	100,00	1,11%
225	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	317.764.700,00	Rp	315.866.700	99,40	2,70%
226	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	317.764.700,00	Rp	315.866.700	99,40	2,70%
227	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	Rp	136.507.700,00	Rp	135.507.700	99,27	1,16%
228	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	45.700.000,00	Rp	45.696.000	99,99	0,39%
229	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	69.192.000,00	Rp	69.192.000	100,00	0,59%
230	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp	33.250.000,00	Rp	32.917.500	99,00	0,28%
231	Belanja Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Cacat	Rp	33.115.000,00	Rp	32.553.500	98,30	0,28%
	Jumlah Belanja	Rp	12.297.162.149,00	Rp	11.712.541.098	95,25	100,00%

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	BELANJA	Rp 12.491.296.285	Rp 11.712.541.098	-6,23%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 9.670.526.900	Rp 8.758.459.648	-9,43%
3	Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp 2.258.000	Rp 3.265.308	44,61%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 694.000	Rp 715.308	3,07%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.564.000	Rp 2.550.000	63,04%
6	Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen RKA-	Rp 2.860.000	Rp 3.940.000	37,76%
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 514.000	Rp 540.000	5,06%
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.346.000	Rp 3.400.000	44,93%
9	Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen Perubahan Peraturan Daerah	Rp 2.798.750	Rp 3.425.000	22,38%
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 554.750	Rp 600.000	8,16%
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.244.000	Rp 2.825.000	25,89%
12	Koordinasi dan Penyelesaian DPA-SKPD	Rp 32.520.750	Rp 35.419.000	8,91%
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 652.750	Rp 660.000	1,11%
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.496.000	Rp 2.275.000	0,00%
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 30.372.000	Rp 32.484.000	6,95%
16	Koordinasi dan Penyelesaian Perubahan DPA-	Rp 2.798.750	Rp 3.425.000	0,00%
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 554.750	Rp 600.000	0,00%
18	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.244.000	Rp 2.825.000	0,00%
19	Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Capaian	Rp 2.425.250	Rp 2.595.308	7,01%
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp 861.250	Rp 895.308	3,95%
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.564.000	Rp 1.700.000	8,70%
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.078.000	Rp 3.062.500	47,38%

23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	514.000	Rp	787.500	53,21%
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.564.000	Rp	2.275.000	0,00%
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4.576.300.775	Rp	4.701.272.473	2,73%
26	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	1.579.320.400	Rp	1.606.641.834	1,73%
27	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp	5.933.000	Rp	76.886.386	1195,91%
28	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp	137.407.913	Rp	130.459.836	-5,06%
29	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp	830.620	Rp	10.764.096	1195,91%
30	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp	45.450.000	Rp	103.390.000	127,48%
31	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	Rp	370.000	Rp	-	0,00%
32	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp	37.620.000	Rp	18.000.000	-52,15%
33	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp	74.105.000	Rp	58.300.000	-21,33%
34	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp	-	Rp	4.440.000	0,00%
35	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp	89.511.120	Rp	82.413.960	-7,93%
36	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp	579.360	Rp	6.952.320	1100,00%
37	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp	24.367.379	Rp	34.024.195	39,63%
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp	-	Rp	373.812	0,00%
39	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	25.940	Rp	23.866	-8,00%
40	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp	174	Rp	1.747	904,02%
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	135.201.921	Rp	132.688.828	-1,86%
42	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	413.968	Rp	4.574.724	1005,09%
43	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	3.253.374	Rp	3.307.278	1,66%
44	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	14.240	Rp	161.469	1033,91%
45	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	9.760.113	Rp	9.921.995	1,66%
46	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	42.718	Rp	484.386	1033,92%
47	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Rp	-	Rp	-	0,00%
48	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Rp	-	Rp	-	0,00%
49	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp	657.750.863	Rp	1.138.955.203	73,16%
50	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	Rp	1.234.560	Rp	12.940.180	948,16%
51	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp	85.533.609	Rp	73.674.786	-13,86%
52	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp	699.081.132	Rp	-	0,00%
53	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	986.640.901	Rp	1.169.288.848	18,51%
54	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	1.852.470	Rp	22.602.724	1120,14%
55	Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	2.506.500	Rp	3.670.000	46,42%
56	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	262.500	Rp	270.000	2,86%
57	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.244.000	Rp	3.400.000	51,52%
58	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	3.267.000	Rp	3.700.000	13,25%
59	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	275.000	Rp	300.000	9,09%
60	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.992.000	Rp	3.400.000	13,64%
61	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	1.753.000	Rp	2.570.000	46,61%
62	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	235.000	Rp	270.000	14,89%
63	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.518.000	Rp	2.300.000	51,52%
64	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp	1.836.000	Rp	1.504.900	-18,03%
65	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	340.000	Rp	354.900	4,38%
66	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.496.000	Rp	1.150.000	0,00%
67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp	2.894.000	Rp	5.770.200	99,38%
68	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	650.000	Rp	670.200	3,11%
69	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.244.000	Rp	5.100.000	127,27%
70	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis	Rp	2.544.000	Rp	3.719.800	46,22%
71	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	300.000	Rp	319.800	6,60%
72	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.244.000	Rp	3.400.000	51,52%
73	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Rp	5.791.500	Rp	3.517.000	-39,27%
74	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	183.500	Rp	183.000	-0,27%
75	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.608.000	Rp	3.334.000	-40,55%
76	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.783.250	Rp	4.439.300	-23,24%
77	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	241.250	Rp	244.300	1,26%
78	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.542.000	Rp	4.195.000	-24,31%
79	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Rp	3.470.000	Rp	2.737.800	-21,10%
80	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	61.000	Rp	49.800	0,00%
81	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.409.000	Rp	2.688.000	-21,15%
82	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Rp	3.695.500	Rp	2.814.500	-23,84%
83	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	244.500	Rp	244.500	0,00%
84	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.451.000	Rp	2.570.000	-25,53%
85	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	3.477.000	Rp	2.789.000	-19,79%
86	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	-	Rp	-	0,00%
87	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.477.000	Rp	2.789.000	-19,79%
88	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	3.367.000	Rp	2.811.000	-16,51%
89	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	44.000	Rp	51.000	15,91%
90	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.323.000	Rp	2.760.000	0,01%
91	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Rp	6.259.250	Rp	15.954.800	154,90%
92	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	734.250	Rp	733.800	-0,06%
93	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.525.000	Rp	15.221.000	175,49%
94	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp	52.969.000	Rp	53.792.000	1,55%
95	Komputer	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000	0,00%
96	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp	48.669.000	Rp	49.042.000	0,77%
97	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	Rp	-	Rp	450.000	0,00%
98	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	-	Rp	-	0,00%
99	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	394.360.785	Rp	458.650.165	16,30%
100	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp	30.382.236	Rp	25.708.345	-15,38%
101	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kerja dan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp	45.724.500	Rp	63.748.320	0,00%
102	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	185.482.049	Rp	229.502.500	23,73%
103	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	Rp	-	Rp	4.000.000	0,00%
104	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp	3.326.000	Rp	3.326.000	0,00%
105	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	5.147.000	Rp	2.975.000	0,00%
106	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	11.299.000	Rp	-	0,00%
107	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp	70.000.000	Rp	70.000.000	0,00%
108	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	Rp	4.500.000	Rp	-	0,00%
109	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan	Rp	-	Rp	1.150.000	0,00%
110	Belanja Modal Alat Uku Universal	Rp	-	Rp	420.000	0,00%
111	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp	-	Rp	950.000	0,00%
112	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp	38.500.000	Rp	5.423.000	0,00%
113	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Rp	-	Rp	1.895.000	0,00%
114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	125.652.923	Rp	150.436.900	19,72%
115	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	Rp	111.712.923	Rp	75.408.400	-32,50%

116	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp	840.000	Rp	-	0.00%
117	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	Rp	-	Rp	4.800.000	0,00%
118	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home)	Rp	13.100.000	Rp	38.428.500	193,35%
119	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp	-	Rp	31.800.000	0,00%
120	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	115.580.350	Rp	102.757.900	-11,09%
121	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan	Rp	115.580.350	Rp	102.757.900	-11,09%
122	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp	2.980.000	Rp	2.760.000	-7,38%
123	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp	2.980.000	Rp	2.760.000	-7,38%
124	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp	328.297.123	Rp	199.329.485	-39,28%
125	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	30.929.226	Rp	18.301.000	-40,83%
126	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	7.336.000	Rp	13.244.000	80,53%
127	Belanja Pengalanan Dinas Biasa	Rp	290.031.897	Rp	167.784.485	-42,15%
128	Pengadaan Mebel	Rp	351.924.700	Rp	80.530.000	-77,12%
129	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp	-	Rp	19.800.000	0,00%
130	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp	-	Rp	8.000.000	0,00%
131	Belanja Modal Mebel	Rp	131.542.000	Rp	52.730.000	-59,91%
132	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp	96.500.000	Rp	-	0,00%
133	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home)	Rp	91.862.700	Rp	-	0,00%
134	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp	13.125.000	Rp	-	0,00%
135	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp	15.100.000	Rp	-	0,00%
136	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp	3.795.000	Rp	-	0,00%
137	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	787.607.350	Rp	515.725.000	-34,52%
138	Belanja Modal Pompa	Rp	4.235.000	Rp	-	0,00%
139	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Rp	2.077.350	Rp	-	0,00%
140	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp	495.000	Rp	-	0,00%
141	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp	43.500.000	Rp	136.100.000	0,00%
142	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home)	Rp	62.400.000	Rp	12.275.000	0,00%
143	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp	3.000.000	Rp	79.925.000	0,00%
144	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Rp	7.700.000	Rp	-	0,00%
145	Belanja Modal Humidity Control	Rp	-	Rp	3.425.000	0,00%
146	Belanja Modal Personal Computer	Rp	404.800.000	Rp	181.750.000	0,00%
147	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp	-	Rp	2.700.000	0,00%
148	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp	259.400.000	Rp	99.550.000	-61,62%
149	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	4.000.000	Rp	4.215.800	5,40%
150	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	0,00%
151	Belanja Paket/Pengiriman	Rp	-	Rp	215.800	0,00%
152	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Rp	16.500.000	Rp	14.732.900	-10,71%
153	Belanja Tagihan Telepon	Rp	16.500.000	Rp	14.732.900	-10,71%
154	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.111.981.800	Rp	1.220.567.009	9,77%
155	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	Rp	-	Rp	6.900.000	0,00%
156	Belanja Jasa Tenaga Pelanggan Umum	Rp	599.323.200	Rp	595.726.319	-0,60%
157	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	415.356.000	Rp	486.138.090	17,04%
158	Belanja Jasa Pencucian Pakaian Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	Rp	-	Rp	34.500.000	0,00%
159	Belanja Sewa Tanaman	Rp	97.302.600	Rp	97.302.600	0,00%

160	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	216.062.750	Rp	208.457.500	-3,52%
161	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	148.798.550	Rp	144.279.400	-3,04%
162	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Rp	8.406.600	Rp	6.144.600	-26,91%
163	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	Rp	-	Rp	48.961.500	0,00%
164	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	49.254.400	Rp	-	0,00%
165	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	9.603.200	Rp	9.072.000	-5,53%
166	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	6.995.800	Rp	5.360.000	-23,38%
167	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Rp	1.595.800	Rp	-	0,00%
168	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	5.400.000	Rp	5.360.000	-0,74%
169	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	189.101.400	Rp	195.898.000	3,59%
170	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	42.672.500	Rp	47.498.000	11,31%
171	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp	13.500.000	Rp	15.000.000	11,11%
172	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	34.800.000	Rp	-	0,00%
173	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric	Rp	9.978.900	Rp	29.700.000	197,63%
174	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	0,00%
175	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	Rp	200.000	Rp	-	0,00%
176	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp	2.450.000	Rp	9.650.000	293,88%
177	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendukung	Rp	32.400.000	Rp	35.200.000	8,64%
178	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendukung	Rp	-	Rp	9.000.000	0,00%
179	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	Rp	10.500.000	Rp	10.250.000	-2,38%
180	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	Rp	-	Rp	16.200.000	0,00%
181	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	Rp	41.200.000	Rp	22.000.000	0,00%
182	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Rp	1.295.828.644	Rp	732.844.100	-43,45%
183	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp	9.765.000	Rp	-	0,00%
184	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp	64.482.000	Rp	59.009.100	0,00%
185	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Penyevas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp	-	Rp	-	0,00%
186	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kena-Bangungan Gedung Kantor	Rp	1.221.581.644	Rp	673.835.000	-44,84%
187	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Rp	1.236.430.985	Rp	1.314.472.750	6,31%
188	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai	Rp	627.591.165	Rp	526.868.750	-16,05%
189	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp	13.900.000	Rp	-	0,00%
190	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	Rp	2.349.250	Rp	2.324.000	-1,07%
191	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp	69.500.000	Rp	-	0,00%
192	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp	-	Rp	10.200.000	0,00%
193	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	255.404.000	Rp	219.706.000	-13,98%
194	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp	40.000.000	Rp	25.700.000	-35,75%
195	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	119.148.000	Rp	80.577.000	-32,37%
196	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	9.000.000	Rp	19.300.000	114,44%
197	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp	118.289.915	Rp	149.211.750	26,14%
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			Rp	19.850.000	
198	Belanja Perlengahan Dinas Dalam Kota	Rp	-	Rp	-	0,00%
199	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Rp	608.839.820	Rp	-	0,00%
200	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp	4.000.000	Rp	-	0,00%
201	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	Rp	28.000.320	Rp	-	0,00%
202	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp	20.000.000	Rp	-	0,00%
203	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	75.601.000	Rp	-	0,00%
204	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp	12.000.000	Rp	-	0,00%
205	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	110.316.000	Rp	-	0,00%
206	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	Rp	166.750.000	Rp	-	0,00%
207	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp	99.672.500	Rp	-	0,00%
208	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	92.500.000	Rp	-	0,00%
209	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Rp	-	Rp	787.604.000	0,00%
210	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	-	Rp	19.902.000	0,00%
211	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	-	Rp	19.224.000	0,00%
212	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp	-	Rp	4.800.000	0,00%
213	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	-	Rp	76.666.000	0,00%
214	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	-	Rp	2.000.000	0,00%
215	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp	-	Rp	9.500.000	0,00%
216	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	-	Rp	114.612.000	0,00%
217	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp	-	Rp	900.000	0,00%
218	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	Rp	-	Rp	240.000.000	0,00%
219	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp	-	Rp	150.000.000	0,00%
220	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	-	Rp	150.000.000	0,00%
221	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	Rp	-	Rp	698.850.000	0,00%
222	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Rp	560.456.750	Rp	-	0,00%
223	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	912.750	Rp	-	0,00%
224	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	13.460.000	Rp	-	0,00%
225	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	546.084.000	Rp	-	0,00%

226	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	Rp	124.088.000	Rp	-	0.00%
227	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	48.296.000	Rp	-	0.00%
228	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	11.970.000	Rp	-	0.00%
229	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	63.822.000	Rp	-	0.00%
230	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Rp	102.638.000	Rp	-	0.00%
231	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp	420.000	Rp	-	0.00%
232	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	9.230.000	Rp	-	0.00%
233	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	92.988.000	Rp	-	0.00%
234	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui	Rp		- Rp	507.626.000	0.00%
235	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp		- Rp	480.000	0.00%
236	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	17.000.000	0.00%
237	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp		- Rp	490.146.000	0.00%
238	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi	Rp		- Rp	117.812.000	0.00%
239	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp		- Rp	1.580.000	0.00%
240	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	14.800.000	0.00%
241	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp		- Rp	2.000.000	0.00%
242	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp		- Rp	99.432.000	0.00%
243	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Rp		- Rp	73.112.000	0.00%
244	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp		- Rp	10.538.000	0.00%
245	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	14.250.000	0.00%
246	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp		- Rp	48.324.000	0.00%
247	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Rp	599.635.900	Rp	625.192.000	4.26%
248	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	424.249.900	Rp	-	0.00%
249	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	3.417.000	Rp	-	0.00%
250	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	17.600.000	Rp	-	0.00%
251	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	Rp	9.280.900	Rp	-	0.00%
252	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSvenir/Cendera Mata	Rp	28.000.000	Rp	-	0.00%
253	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	197.560.000	Rp	-	0.00%
254	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	6.072.000	Rp	-	0.00%
255	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	Rp	83.000.000	Rp	-	0.00%
256	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	79.320.000	Rp	-	0.00%
257	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	175.386.000	Rp	-	0.00%
258	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	8.582.000	Rp	-	0.00%
259	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	2.340.000	Rp	-	0.00%
260	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	15.640.000	Rp	-	0.00%
261	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	15.180.000	Rp	-	0.00%
262	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	6.000.000	Rp	-	0.00%
263	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	127.644.000	Rp	-	0.00%
264	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp		- Rp	59.657.600	0.00%
265	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp		- Rp	3.285.600	0.00%
266	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp		- Rp	1.000.000	0.00%
267	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	Rp		- Rp	1.600.000	0.00%
268	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	36.100.000	0.00%
269	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp		- Rp	6.072.000	0.00%
270	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp		- Rp	11.600.000	0.00%
271	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp		- Rp	351.055.000	0.00%
272	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan	Rp		- Rp	9.187.000	0.00%
273	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	Rp		- Rp	14.000.000	0.00%
274	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	169.400.000	0.00%
275	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp		- Rp	77.000.000	0.00%
276	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp		- Rp	81.468.000	0.00%
277	Pengawasan Penanaman Modal	Rp		- Rp	214.479.400	0.00%
278	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp		- Rp	8.187.600	0.00%
279	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	Rp		- Rp	3.319.800	0.00%
280	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	Rp		- Rp	2.400.000	0.00%
281	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp		- Rp	33.700.000	0.00%
282	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp		- Rp	15.180.000	0.00%
283	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator	Rp		- Rp	9.900.000	0.00%
284	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	Rp		- Rp	12.000.000	0.00%
285	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp		- Rp	129.792.000	0.00%

286	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN	Rp	197.519.750	Rp	315.866.700	59,92%
287	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	197.519.750	Rp	-	0,00%
288	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	1.007.750	Rp	-	0,00%
289	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	36.139.000	Rp	-	0,00%
290	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	95.700.000	Rp	-	0,00%
291	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp	32.585.000	Rp	-	0,00%
292	Belanja Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi	Rp	32.088.000	Rp	-	0,00%
293	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	-	Rp	315.866.700	0,00%
294	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	Rp	-	Rp	135.507.700	0,00%
295	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	-	Rp	45.696.000	0,00%
296	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	-	Rp	69.192.000	0,00%
297	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp	-	Rp	32.917.500	0,00%
298	Belanja Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi	Rp	-	Rp	32.553.500	0,00%
Jumlah Belanja		Rp	12.491.296.285	Rp	11.712.541.098	

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - I.RA	Realisasi 2024		Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Rincian Objek	0		0	

Penjelasan :
DPMPTSP tidak ada menerima pendapatan

3.2	Belanja	Realisasi 2024		Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	BELANJA DAERAH	Rp	11.712.541.098,00	Rp	12.491.296.285,00
	BELANJA OPERASI	Rp	11.035.769.598,00	Rp	11.300.164.235,00
	Belanja Pegawai	Rp	4.701.272.473,00	Rp	4.576.300.775,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.283.810.732,00	Rp	2.144.207.240,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	2.417.461.741,00	Rp	2.432.093.535,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.334.497.125,00	Rp	6.723.863.460,00
	Belanja Barang	Rp	1.834.194.981,00	Rp	1.767.572.804,00
	Belanja Jasa	Rp	3.461.889.159,00	Rp	3.277.790.615,00
	Belanja Pemeliharaan	Rp	870.628.500,00	Rp	1.388.468.144,00
	Belana Peralatan Dinas	Rp	167.784.485,00	Rp	290.031.897,00
	BELANJA MODAL	Rp	676.771.500,00	Rp	1.191.132.050,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	676.771.500,00	Rp	1.191.132.050,00
	Belanja Modal Alat Besar	Rp	-	Rp	4.235.000,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	1.150.000	Rp	-
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	420.000,00	Rp	2.572.350
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	299.583.500,00	Rp	438.904.700,00
	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Rp	83.350.000	Rp	23.825.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	-	Rp	15.100.000,00
	Belanja Modal Komputer	Rp	290.373.000,00	Rp	702.700.000,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp	1.895.000,00	Rp	3.795.000

Penjelasan :
Uraikan realisasi belanja per Rincian Objek belanja, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

No	Uraian	Capaian	Keterangan
1	Belanja Pegawai	Tidak Tercapai	Pegawai Pensiun
2	Belanja Barang dan Jasa	Tidak Tercapai	Sisa Negosiasi
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tidak Tercapai	Sisa Negosiasi

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-

Penjelasan :

Tidak ada pendapatan di DPMPTSP untuk tahun 2024

3.4 Beban

	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI	Rp 11.986.013.291,96	Rp 12.295.046.169,64
Beban Pegawai	Rp 4.701.272.473,00	Rp 4.576.300.775,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.283.810.732,00	Rp 2.144.207.240,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp 2.417.461.741,00	Rp 2.432.093.535,00
Beban Barang dan Jasa	Rp 6.335.153.113,00	Rp 6.769.419.684,00
Beban Barang	Rp 1.834.853.939,00	Rp 1.813.023.101,00
Beban Jasa	Rp 3.461.886.189,00	Rp 3.277.896.542,00
Beban Pemeliharaan	Rp 870.628.500,00	Rp 1.388.468.144,00
Beban Penyaluran Dinas	Rp 167.784.485,00	Rp 290.031.897,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 949.587.705,96	Rp 949.325.710,64
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 616.565.375,18	Rp 532.058.386,42
Beban Penyusutan Alat Besar	Rp 9.427.142,87	Rp 12.627.142,88
Beban Penyusutan Alat Angkutan	Rp 1.549.935,21	Rp 62.174.924,64
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 170.617,50	Rp 128.617,50
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 110.974.630,00	Rp 164.373.860,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	Rp 1.967.500,00	Rp 2.865.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 9.806.760,00	Rp 19.613.520,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	Rp 1.995.000,00	Rp 3.990.000,00
Beban Penyusutan Komputer	Rp 151.993.812,50	Rp 266.014.250,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	Rp 406.428,55	Rp 271.071,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 164.379.009,23	Rp 413.003.011,90
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	Rp 164.379.009,23	Rp 413.003.011,90
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 2.132.156,16	Rp 4.264.312,32
Beban Pemusutan Jaringan	Rp 2.132.156,16	Rp 4.264.312,32
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO. Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

No	Uraian	LO (Rp)	I.RA (Rp)	Perbedaan
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 203.247.600,00	Rp 203.250.600,00	Rp (-3.000)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp 27.485.453,00	Rp 25.708.345,00	Rp 1.777.108
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	Rp 63.085.320	Rp 63.748.320	Rp (663.000)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	Rp 336.025.316,00	Rp 337.637.816,00	Rp (1.612.500)
			Total Perbedaan	Rp (501.392)

3.5 Aset

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR	Rp 5.331.400,00	Rp 5.990.358,00
Kas dan Setara Kas	Rp -	Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
Persediaan	Rp 5.331.400,00	Rp 5.990.358,00
Barang Pakai Habis	Rp 5.331.400,00	Rp 5.990.358,00
ASET TETAP	Rp 12.811.990.116,83	Rp 11.521.216.710,26
Peralatan dan Mesin	Rp 7.638.082.232,73	Rp 7.264.965.216,00
Alat Besar	Rp 894.921.940,10	Rp 934.921.940,10
Alat Angkutan	Rp 1.277.817.012,51	Rp 1.270.413.612,14
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 4.786.008,28	Rp 14.946.008,28
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.642.062.061,19	Rp 2.396.140.836,02
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 178.537.755,84	Rp 95.187.755,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 93.987.600,00	Rp 99.387.600,00
Komputer	Rp 2.540.279.854,81	Rp 2.450.172.464,29
Rambu-Rambu	Rp 5.690.000,00	Rp 3.795.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp 16.449.055.712,00	Rp 16.449.055.712,00
Bangunan Gedung	Rp 16.449.055.712,00	Rp 16.449.055.712,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 170.572.492,70	Rp 170.572.492,00
Jaringan	Rp 170.572.492,70	Rp 170.572.492,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 2.102.700,00	Rp 2.102.700,00
Bahan Perpustakaan	Rp 2.102.700,00	Rp 2.102.700,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (11.647.937.886,97)	Rp (12.365.479.411,11)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp (6.018.279.845,80)	Rp (5.732.078.594,49)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (5.595.543.542,63)	Rp (6.603.550.630,40)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp (34.114.498,54)	Rp (29.850.186,22)
ASET LAINNYA	Rp 139.315.000,00	Rp 139.315.000,00
Aset Tidak Berwujud	Rp 193.960.000,00	Rp 193.960.000,00
Aset Tidak Berwujud	Rp 193.960.000,00	Rp 193.960.000,00
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (54.645.000,00)	Rp (54.645.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (54.645.000,00)	Rp (54.645.000,00)

Penjelasan

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan/Pengurangan
1	Barang Pakai Habis	Rp 5.331.400,00	Rp 5.990.358,00	Rp (658.958)
2	Alat Besar	Rp 894.921.940,10	Rp 934.921.940,10	Rp -
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.642.062.061,19	Rp 2.396.140.836,02	Rp 245.921.225
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 178.537.755,84	Rp 95.187.755,84	Rp 83.350.000
5	Komputer	Rp 2.540.279.854,81	Rp 2.450.172.464,29	Rp 90.107.391
6	Bangunan Gedung	Rp 16.449.055.712,00	Rp 16.449.055.712,00	Rp -
7	Akumulasi Penyusutan	Rp (11.647.937.886,97)	Rp (12.365.479.411,11)	Rp 717.541.524
8	Aset Tidak Berwujud	Rp 54.645.000,00	Rp 193.960.000,00	Rp (139.315.000)
9	Aset Lain-lain	Rp 7.980.018	Rp -	Rp 7.980.018
		Total	Rp 1.004.926.200	

3.6	Kewajiban	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	KEWAJIBAN	Rp 98.457	Rp 105.927		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp 98.457	Rp 105.927		
	Utang Belanja	Rp 98.457	Rp 105.927		
	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 98.457	Rp 105.927		
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp 98.457	Rp 105.927		

Penjelasan

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban selama tahun berjalan.

No	Uraian	2024	2023	Penambahan/Pengurangan
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp 98.457	Rp 105.927	Rp (7.470)
			Total	Rp (7.470)

3.7	Ekuitas	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	EKUITAS AWAL	Rp 11.666.416.141,26	Rp 17.017.931.033,95		
	RK PPKD	Rp 11.712.541.098,00	Rp 12.491.296.285,00		
	Surplus/Defisit-LO	Rp (12.004.598.791,96)	Rp (12.295.046.169,64)		
	Ekuitas Mutasi Persediaan	Rp 18.590.000,00	Rp ,00		
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	Rp 1.378.550.284,01	Rp (4.201.156.008,05)		
	Ekuitas Mutasi Penghapusan	Rp (173.812.920,36)	Rp ,00		
	Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	Rp 38.823.093,00	Rp (38.500.000,00)		
	Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	Rp (11.420.692,63)	Rp ,00		
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	Rp 12.625.088.211,32	Rp 11.666.416.141,26		

Penjelasan

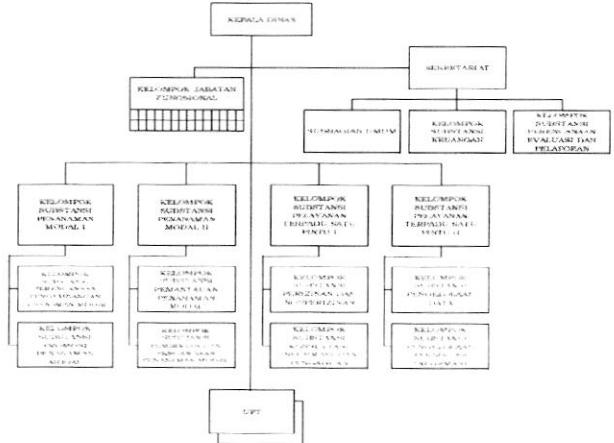
Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan

No	Uraian	2024	2023	Penambahan/Pengurangan
1	Ekuitas Mutasi Persediaan	Rp 18.590.000,00	Rp ,00	Rp 18.590.000,00
2	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	Rp 1.378.550.284,01	Rp (4.201.156.008,05)	Rp 5.579.706.292,06
3	Ekuitas Mutasi Penghapusan	Rp (173.812.920,36)	Rp ,00	Rp (173.812.920,36)
4	Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	Rp 38.823.093,00	Rp (38.500.000,00)	Rp 77.323.093,00
5	Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	Rp (11.420.692,63)	Rp ,00	Rp (11.420.692,63)
		Total		Rp 5.471.795.772,07

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian	Tugas	Fungsi
Dinas	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas. d. pengoordinasian penyelegaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal. e. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal. f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu. g. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi. i. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu. j. penerbit dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas. k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas. l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas. m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas. n. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas. o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas. p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas.
Sekretariat Umum	Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat; d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja kegiatan kelompok substansi, e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas. g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas. h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas. i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas. j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas. k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas. l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat; m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat. o. pengoordinasian penyusunan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas. p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
Subbagian Umum	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan; b. penyusunan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas. d. penyelenggaraan kerumah tanggungan dan pengelolaan aset Dinas. e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas. f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. g. penyusunan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas. h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas. i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas. k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas. l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan; o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.
Kelompok Substansi Keuangan	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan; b. penyusunan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan; c. penatausahaan keuangan Dinas. d. pengelolaan perbedaharan Dinas. e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas. f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas. g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas. h. pengelolaan kearsipan. i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan. j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan, dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas	a. penyusunan perencanaan kegiatan. b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan. c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas; d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas; e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas. f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan; g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas
Kelompok Substansi Penanaman Modal I	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengordianasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal.	a. pengordinasian perencanaan program kerja b. pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal c. pengordinasian pelaksanaan program kerja d. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengembangan dan penanaman modal; e. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal. f. pengordinasian perencanaan, pengembangan, promosi dan kerjasama Mal Pelayanan Publik; g. pengordinasian pengelolaan data dan informasi; h. pengordinasian pengelolaan kearsipan; i. pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan; j. pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; k. pengordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan pengembangan penanaman modal	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pengembangan penanaman modal, c. pelaksanaan perencanaan pengembangan penanaman modal; d. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan iklim penanaman modal; e. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan evaluasi regulasi penanaman modal dan perizinan, f. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Mal Pelayanan Publik, g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik, h. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyusunan standar pelayanan dalam pelayanan Mal Pelayanan Publik i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan tata tertib dan pengawasan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal; m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal	Tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan promosi penanaman modal	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal. b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal; c. pelaksanaan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah; d. pelaksanaan penyusunan bahan informasi dan promosi di bidang penanaman modal; e. pelaksanaan pengembangan strategi promosi penanaman modal; f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dan Mal Pelayanan Publik; g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kerjasama layanan Mal Pelayanan Publik; h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal; i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal; j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal; k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal, dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas
Kelompok Substansi Penanaman	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengordianasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan	a. pengordinasian perencanaan program kerja, b. pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penanaman modal;

Kelompok Substansi Pemantauan Penanaman Modal	Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemantauan penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemantauan Penanaman Modal, b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemantauan penanaman modal, c. pelaksanaan pemantauan penanaman modal, d. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal, e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal,
Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan penanaman modal, c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan pengawasan penanaman modal, d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, e. pelaksanaan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal, f. pelaksanaan penyusunan bahan dan pengusulan pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha kepada lembaga Online Single Submission; g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal. k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian perencanaan program kerja, b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan terpadu satu pintu, c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja; d. pengoordinasian penyelenggaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan; e. pengoordinasian penyelenggaran kegiatan pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan, f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan	koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan, b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, c. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan; d. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi dan penerbitan perizinan dan dokumen nonperizinan,
Kelompok Substansi Konsultasi Informasi dan Pengaduan	Tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pelayanan konsultasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Konsultasi Informasi dan Pengaduan, b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan c. pelaksanaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan dan nonperizinan, d. pelaksanaan pengelolaan layanan informasi perizinan dan nonperizinan.
Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian perencanaan program kerja, b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan teknologi informasi, c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja; d. pengoordinasian penyelenggaran kegiatan pengelolaan data, e. pengoordinasian penyelenggaran kegiatan pengelolaan teknologi informasi, f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan, h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan, i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pengelolaan Data	Melaksanakan penyampaian bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan data.	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data b. penyampaian bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data. c. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan. d. pelaksanaan perlindungan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan. e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data. f. pelaksanaan pengelolaan karsipan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data. g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data. h. pelaksanaan tundak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Data; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi	Melaksanakan penyampaian bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan teknologi informasi	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan teknologi informasi. b. penyampaian bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan teknologi informasi. c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan teknologi informasi. d. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal dan Perizinan. e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi. f. pelaksanaan pengelolaan karsipan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi. g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi. h. pelaksanaan tundak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut

Bab V Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penutup 5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari target Rp 0 yang terdiri dari

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0 atau 0% dari target.
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0 atau 0% dari target.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0 atau 0% dari target.
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0 atau 0% dari target

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.712.541.098,00 atau 95,25% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 11.035.769.598,00 atau sebesar 95,04 % dari anggaran Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp . 5.118.738.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.701.272.473,00 atau 91,84% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 6.492.858.627,00 terealisasi sebesar Rp. 6.334.497.125,00 atau sebesar 97,56% dari anggaran

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 676.771.500,00 atau 98,72% dari anggaran

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp. 12.625.186.668,32 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 5.331.400,00, Aset Tetap sebesar Rp 12.611.875.250,46 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 7.980.017,86

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 98.457,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp. 12.625.088.211,32

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0,00.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 12.004.598.791,96 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp. 12.004.598.791,96 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar (Rp. 12.004.598.791,96)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp. 11.666.416.141,26 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar (Rp. 12.004.598.791,96) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan Desember tahun 2024

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp. 1.232.139.764,02

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 1.250.729.763,72 merupakan ekuitas Desember Tahun 2024.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

